



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diplomasi Parlemen Indonesia: Kepemimpinan DPR RI dalam The 44th AIPA General Assembly 2023

Asma Farah Syauqiyah¹, Akim², Insan Abdirrohman³

¹Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia, farahsyau2@gmail.com

²Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia, akim@unpad.ac.id

³Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Indonesia, insan_ab@yahoo.com

Corresponding Author: farahsyau2@gmail.com

Abstract: *Parliamentary diplomacy has become an important element in regional cooperation, especially in ASEAN through the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). This research aims to analyze DPR RI's leadership in parliamentary diplomacy at the 44th AIPA General Assembly 2023. Referring to Götz's definition of parliamentary diplomacy, this research examines how the House of Representatives plays an active role in formulating resolutions that support inter-parliamentary cooperation in ASEAN, without using a soft power approach. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, document studies, and analysis of relevant literature. The main focus of the research is on the process of drafting resolutions, the diplomatic strategies used by the House of Representatives, and how these roles reflect Indonesia's leadership at the regional level. The results show that DPR RI plays a key role in strengthening ASEAN interparliamentary cooperation through dialogic and collaborative approaches. The House of Representatives' success in pushing for the passage of resolutions demonstrates Indonesia's commitment to ASEAN regional integration. This research contributes to the understanding of parliamentary diplomacy in ASEAN and highlights the importance of DPR RI's role as a key actor in regional cooperation through AIPA*

Keyword: *Parliamentary Diplomacy, AIPA, The 44th AIPA General Assembly, ASEAN, DPR RI*

Abstrak: Diplomasi parlemen telah menjadi elemen penting dalam kerja sama regional, khususnya di ASEAN melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan DPR RI dalam diplomasi parlemen pada *The 44th AIPA General Assembly 2023*. Mengacu pada definisi diplomasi parlemen menurut Götz, penelitian ini mengkaji bagaimana DPR RI berperan aktif dalam merumuskan resolusi yang mendukung kerja sama antarparlemen di ASEAN, tanpa menggunakan pendekatan soft power. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan analisis literatur yang relevan. Fokus utama penelitian adalah pada proses penyusunan resolusi, strategi diplomasi

yang digunakan DPR RI, serta bagaimana peran tersebut mencerminkan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR RI memainkan peran kunci dalam memperkuat kerja sama antarpemerintah ASEAN melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif. Keberhasilan DPR RI dalam mendorong pengesahan resolusi menunjukkan komitmen Indonesia terhadap integrasi regional ASEAN. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang diplomasi parlemen di ASEAN serta menyoroti pentingnya peran DPR RI sebagai aktor utama dalam kerja sama regional melalui AIPA.

Kata Kunci: Diplomasi Parlemen, AIPA, Sidang Umum AIPA ke-44, ASEAN, DPR RI.

PENDAHULUAN

Perkembangan global yang terjadi di dunia Hubungan Internasional telah membawa peran diplomasi yang semakin tidak terbatas. Apalagi dalam dunia yang saling terhubung seperti saat ini, istilah diplomasi telah berkembang melampaui interaksi tradisional antar negara dan mencakup berbagai bentuk keterlibatan dan tingkatan. Diplomasi parlemen merupakan salah satunya, dan merupakan istilah yang masih segar dalam studi Hubungan Internasional. Munculnya diplomasi parlemen juga didukung dengan alasan bahwa adanya batas yang tidak jelas antara hubungan domestik dan internasional telah memberikan ruang lingkup lebih luas bagi parlemen sebuah negara untuk berperan sebagai aktor dalam urusan internasional (Masters, 2015). Secara singkat, diplomasi parlemen dapat diartikan sebagai diplomasi yang dilakukan oleh anggota parlemen suatu negara. Praktik ini banyak dilakukan dalam hubungan bilateral, pertemuan organisasi regional, hingga organisasi internasional dan sering kali digunakan sebagai wadah untuk membahas berbagai isu dan konflik.

Meskipun belum terdapat studi yang secara mendalam membahas diplomasi parlemen yang mampu menjelaskannya secara teoretis, namun diplomasi parlemen secara praktik telah banyak dilakukan dalam beberapa dekade terakhir. *Inter-Parliamentary Union* (IPU) melalui laporannya "*Parliamentary Involvement in International Affairs*" (2005) telah mencatat banyak praktik diplomasi parlemen yang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia. Indonesia, salah satunya telah melakukan diplomasi parlemen melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), salah satu institusi tertinggi dalam sistem pemerintahannya. Dalam menjalankan fungsinya mulai dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, DPR RI memiliki alat kelengkapan salah satunya adalah Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yang mencatat segala bentuk urusan internasional parlemen Indonesia. Melalui keterlibatan yang aktif dalam Hubungan Internasional, selain melakukan kerja sama bilateral dengan 102 negara di seluruh dunia, DPR RI juga terlibat dalam urusan internasional dan regional seperti keanggotaannya dalam *ASEAN Inter Parliamentary Assembly* (AIPA).

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di mana dulunya bernama *ASEAN Inter-Parliamentary Organization* (AIPO), merupakan organisasi parlementer regional yang dibentuk untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi antara parlemen negara-negara anggota ASEAN (BKSAP DPR RI, 2019). Organisasi ini didirikan pada 2 September 1977 sebagai hasil dari Konferensi Inter-Parlemen ASEAN ketiga yang diselenggarakan di Manila, Filipina. Indonesia memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam pembentukan AIPA, karena menjadi salah satu inisiatif untuk mengusulkan pentingnya kerjasama antar parlemen demi mendukung tujuan ASEAN dan memperkuat solidaritas regional. Selanjutnya, demi mewujudkan institusi yang lebih efektif dan terintegrasi, pada Sidang Umum ke-27 AIPO tahun 2006 di Filipina, Statuta AIPO resmi diamandemen menjadi Statuta AIPA. Saat ini, AIPA beranggotakan 10 Parlemen dari ASEAN Member Countries yaitu (Indonesia, Kamboja, Malaysia, Laos, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Brunei Darussalam).

Melalui AIPA, Indonesia telah banyak berpartisipasi dan berperan aktif dalam mengatasi isu-isu di kawasan terutama dalam ranah parlemen. Indonesia juga beberapa kali

berkesempatan untuk memegang tonggak kepemimpinan di AIPA dan menjadi pemrakarsa berbagai resolusi. Pada tahun 2023 kemarin misalnya, Indonesia menjadi tuan rumah dalam *The 44th General Assembly AIPA*, dimana sidang tersebut menghasilkan resolusi-resolusi untuk kemajuan ASEAN ke depannya. Sebagai tuan rumah, Indonesia mengajak anggota-anggota parlemen di AIPA untuk bekerja sama dalam menghadapi isu-isu di kawasan, termasuk isu keamanan dan stabilitas regional. Sifat kepemimpinan Indonesia di AIPA didukung oleh peran diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI.

Sementara itu peran diplomasi parlemen masih belum cukup banyak dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu, terutama dengan fokus diplomasi parlemen Indonesia. Dalam hal ini, untuk memahami diplomasi parlemen Indonesia terkhususnya di AIPA, peneliti menelusuri berbagai penelitian terdahulu yang setidaknya dibagi dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah penelitian terkait diplomasi parlemen secara umum, yang dilakukan oleh Thompson (1965) tentang kemunculan diplomasi baru yang menjelaskan akar dari diplomasi parlemen dalam organisasi internasional; penelitian oleh Götz (2005) dimana ia mengartikan diplomasi parlemen melalui dua pendekatan yaitu secara prosedur dan secara konsep; penelitian oleh Boer dan Weisglas (2007) yang menjelaskan kemunculan peran anggota parlemen di ranah Internasional; selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Jaskiernia (2022) tentang diplomasi parlemen sebagai dimensi baru dalam kegiatan parlemen kontemporer.

Kategori selanjutnya adalah praktik-praktik diplomasi, yang dilakukan oleh Wang (2016) tentang diplomasi parlemen di dalam konstitusi China yang mempengaruhi kebijakan diplomasi China ke luar negeri; penelitian tentang praktik diplomasi parlemen oleh kongres Amerika Serikat yang menyoroti sidang parlemen negara-negara NATO oleh Šabič dkk (2016); penelitian oleh Durdular (2017) terkait diplomasi parlemen dalam sidang parlemen *Turkic-Speaking Countries* (TurkPA); penelitian oleh Pepe & Guahk (2023) tentang diplomasi parlemen yang menggaris bawahi hubungan Uni Eropa dan Korea Selatan dan kerja sama bilateral yang dipengaruhi situasi politik domestik masing-masing negara; penelitian tentang praktik diplomasi parlemen dalam Arab Spring yang mengkaji sidang parlemen Mediterania dan parlemen Eropa oleh Cofelice (2016).

Ketiga adalah kategori tentang praktik-praktik diplomasi parlemen oleh Indonesia yang telah dilakukan oleh Zon dan Andika (2021) tentang diplomasi parlemen Indonesia melalui kepemimpinannya dalam *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC) dan dampaknya pada keterbukaan sistem parlemen di Indonesia; penelitian selanjutnya dalam kategori ini dilakukan oleh Ridwan, dkk (2022) mengenai peran DPR RI melalui diplomasi terhadap isu kemanusiaan Myanmar; penelitian mengenai diplomasi parlemen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina oleh Cantikaputri dan Prihatini (2023); serta penelitian oleh Adiputri (2024) terkait diplomasi parlemen sebagai bagian dari interpretasi diplomasi multilateral Indonesia dalam perdebatan krisis iklim dan keberlanjutan.

Setelah menelusuri dan membandingkan beberapa penelitian terdahulu, peneliti menemukan celah kebaruan yang dapat dikaji yaitu peristiwa dan dimensi diplomasi parlemen. Peristiwa yang dimaksud merupakan sidang umum AIPA ke 44 pada tahun 2023 lalu di mana Indonesia menjadi negara yang mengusulkan paling banyak resolusi sekaligus menjadi tuan rumah. Sementara itu, dimensi diplomasi parlemen yang digunakan adalah diplomasi parlemen menurut Götz (2005). Karena itu, artikel ini ditulis untuk menganalisis bagaimana diplomasi parlemen oleh Indonesia digunakan dalam sidang umum AIPA ke-44 hingga akhirnya berbagai resolusi muncul. Artikel ini juga akan menjelaskan bagaimana kepemimpinan Indonesia di AIPA dapat membawa kepentingan bersama negara-negara anggota dalam cakupan regional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif menurut Lamont untuk memahami pendalaman makna atau proses melalui pengumpulan data berbasis dokumen dan arsip, wawancara, dan penelitian berbasis internet (Lamont, 2015). Peneliti akan

melakukan triangulasi data melalui tiga jenis sumber yang berbeda. Selanjutnya, teknik analisis data yang dilakukan adalah mengumpulkan dan mengorganisir data, membagi data dalam kategori, dan mendeskripsikan kategori-kategori tersebut, agar menjadi analisis temuan dalam narasi kualitatif dengan memberikan informasi deskriptif mengenai informasi, dan menginterpretasi data untuk memberikan sebuah analisis.

Selanjutnya, penelitian menggunakan teknik *sampling* berdasarkan Creswell yang disebut sebagai *purposeful sampling* untuk menentukan narasumber yang relevan dengan data yang dibutuhkan. Creswell (2014) menyebutkan bahwa *purposeful sampling* melibatkan pengambilan sampel riset berdasarkan kepercayaan periset bahwa sampel mungkin dapat memberikan kontribusi terhadap analisis riset (Cresswell, 2014). Sampel diambil dari populasi yang sudah dipilih untuk diteliti melibatkan DPR RI sebagai aktor utama yang melakukan diplomasi parlemen dalam *the 44th AIPA Assembly 2023*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diplomasi Parlemen

Istilah diplomasi telah dikenal sejak lama, dimana secara tradisional praktik ini hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif sebuah negara. Namun, sering berjalannya waktu dan mengaburnya batas-batas di era globalisasi, menyebabkan kebutuhan lebih besar bagi parlemen untuk ikut campur tangan dalam menghadapi isu-isu luar negeri. Selain itu, dengan meningkatnya berbagai isu dari struktur internasional yang diajukan ke parlemen untuk dipertimbangkan, telah menghasilkan sejumlah struktur antar-parlemen untuk memfasilitasi pengawasan isu-isu internasional. Isu yang dimaksud di antaranya masalah polusi, iklim, hingga terorisme transnasional yang mengabaikan perbatasan negara. Para anggota parlemen pun secara individual dan parlemen sebagai institusi menyadari bahwa peran mereka dibutuhkan dan diminta untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah-masalah kompleks yang memerlukan berbagai pendekatan. Oleh karena itu, diplomasi parlemen muncul sebagai alat sebuah parlemen untuk dapat menyampaikan dan menyelesaikan isu-isu global dalam dunia internasional.

Sementara itu, diplomasi parlemen merupakan istilah yang secara luas belum dipelajari sebagai teori analisis, namun diplomasi parlemen secara praktik telah banyak dilakukan dalam beberapa kurun waktu dekade terakhir. Pernyataan ini didukung oleh *Inter-Parliamentary Union* (IPU) dalam laporannya pada tahun 2005 yaitu, “Keterlibatan Parlemen dalam Hubungan Internasional berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk memperdebatkan agenda yang semakin transnasional. Parlemen tidak punya pilihan lain selain terlibat dalam negosiasi multilateral, terutama karena hasil-hasil negosiasi itu harus diberlakukan terhadap hukum domestik”. IPU juga mengklasifikasikan diplomasi parlemen dalam berbagai bentuk, mulai dari kerjasama bilateral, hingga pembentukan ombudsman politik dalam ranah internasional

Meskipun secara teoretis diplomasi parlemen masih memiliki kekurangan dalam pengertian dan dimensinya, beberapa definisi dari penelitian terdahulu ditemukan. Rusk (1955) misalnya, berpendapat bahwa diplomasi parlemen muncul dalam Hubungan Internasional dan Hukum Internasional sebagai sebuah konsep yang menjelaskan negosiasi multilateral yang dicirikan dengan pelembagaan, aturan prosedur, debat publik, dan pemungutan suara pada rancangan resolusi (Rusk, 1955). Selanjutnya, Rabi Ray mengartikan bahwa diplomasi parlemen memungkinkan anggota parlemen untuk dapat berperan sebagai diplomat, atau sidang parlemen dapat mengintervensi secara aktif penyusunan kebijakan luar negeri (Ray, 1991). Dalam hal ini diplomasi parlemen memainkan peran besar dalam aktivitas antar parlemen, sebagaimana di proyeksikan pada institusi seperti IPU (Ghebali, 1993). Namun secara fakta, istilah diplomasi parlemen sudah digunakan jauh sebelum negosiasi multilateral diperkenalkan oleh para diplomat (Løvland, 1906). Penonjolan adanya pemikiran terkait

diplomasi parlemen berkaitan dengan globalisasi dan meningkatnya kebutuhan badan legislatif dalam menangani isu-isu transnasional (Squarcialupi, 2000).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, Götz (2005) menyimpulkan dalam *On the Origins of Parliamentary Diplomacy*, bahwa diplomasi parlemen dapat diartikan melalui dua pendekatan, baik secara prosedur ataupun secara konsep. Sebagai prosedur, diplomasi parlemen adalah diplomasi yang melibatkan perwakilan negara-negara melakukan negosiasi dalam forum multilateral. Sementara itu secara konsep, diplomasi parlemen menganggap parlemen atau anggota parlemen dapat berperan sebagai aktor dalam Hubungan Internasional untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan diplomatik. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan terhadap pengertian diplomasi parlemen secara teoretis. Pengertian pertama mengacu pada metode spesifik pada pembuatan kebijakan, sementara pengertian kedua mengacu terhadap tipe-tipe jenis aktor tertentu (Götz, 2005). Karena itu, parlemen saat ini tidak lagi hanya terlibat dalam proses-proses kebijakan luar negeri, melainkan terlibat secara langsung sebagai partisipan dalam Hubungan Internasional. Hal ini mencakup Anggota Parlemen (MPs) sebagai bagian dari delegasi nasional untuk negosiasi internasional, delegasi parlemen untuk pertemuan antar pemerintah, kelompok studi parlemen dan perjalanan penelitian, dan bahkan pendirian kantor-kantor penghubung parlemen di luar negeri (IPU, 2005).

Diplomasi Parlemen Indonesia dalam AIPA

Indonesia telah memainkan peran penting sejak AIPA dibentuk pada awal 1970-an (BKSAP DPR RI, 2019). Selain menjadi salah satu pencetus dari berdirinya AIPA, Indonesia juga secara otomatis mengambil peran kepemimpinan awal pada saat itu. Tidak berhenti di sana, Indonesia kembali memimpin AIPA pada periode 2011-2012 dan menghadapi tantangan bagaimana DPR RI dapat mendekatkan ASEAN, utamanya AIPA sebagai wadah parlemen-parlemen di Asia Tenggara kepada masyarakat. Peran lembaga parlemen dalam mengenalkan ASEAN menjadi pusat perhatian DPR RI kala itu, bagaimana agar hubungan antar-ASEAN tidak hanya didominasi oleh pemerintah pusat, melainkan pemahaman ini bisa sampai ke tingkat masyarakat luas. Oleh karena itu, untuk mengenalkan ASEAN khususnya AIPA kepada masyarakat luas ASEAN, elemen-elemen soft power dikerahkan.

Beberapa program dibuat oleh DPR RI, mulai dari seminar mengenai AIPA dengan tema *Enhancing the ASEAN Transformation into a Solid Community*; mengadakan lomba penulisan karya tulis ilmiah tentang “Peran Parlemen dalam Terwujudnya ASEAN Community 2015”; menciptakan *website* khusus yang didedikasikan untuk memberikan informasi update dari AIPA dan memanfaatkan media sosial seperti twitter, hingga membuat film dokumenter mengenai Diplomasi Parlemen yang dijalankan oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. Film dengan durasi tujuh menit tersebut juga digunakan sebagai sarana edukasi bagi pelajar yang secara rutin melakukan kunjungan ke DPR RI. Selain itu, film dokumenter ini menjadi salah satu alat bagi DPR RI untuk menjalankan diplomasi parlemennya.

Selanjutnya, pada Sidang Umum AIPA ke-33 pun, Indonesia sebagai tuan rumah mengangkat tema “*Strengthening the Parliamentary Roles towards ASEAN Community 2015*” untuk menandai peran penting legislatif dalam proses transformasi ASEAN menuju integrasi ASEAN. Pada Sidang Umum AIPA ke-33 ini, berbagai agenda dibahas dan dilaksanakan, terutama dalam menyatukan pandangan politik antar sesama anggota, pembahasan tantangan-tantangan global seperti manajemen penanggulangan bencana, ekonomi hijau, hingga toleransi beragama. DPR RI juga berkesempatan dalam berdiplomasi untuk mendukung perdamaian dan stabilitas regional yaitu dukungan dalam *Autonomous Region of Muslim Mindanao* (ARMM) sebagai pengamat AIPA. Tidak hanya itu, isu berat seperti masalah Laut China Selatan diangkat oleh Indonesia dan berusaha diselesaikan melalui jalur diplomasi (BKSAP DPR RI, 2012).

Keaktifan Indonesia dalam AIPA terus berlanjut meskipun kepemimpinan beralih kepada negara anggota lainnya. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia

menggunakan forum AIPA untuk mendukung prinsip demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di seluruh wilayah melalui diplomasi parlemen. Diplomasi ini dilakukan dengan memungkinkan parlemen negara-negara anggota berbicara satu sama lain, mendukung kebijakan bersama, dan berpartisipasi aktif dalam menghasilkan resolusi tentang hal-hal penting seperti hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, dan keamanan regional. Indonesia yang memiliki sistem demokrasi di negaranya juga memberikan kredibilitas dalam mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat institusi parlemen di ASEAN. Melalui diplomasi parlemen yang aktif dalam AIPA, Indonesia mampu membangun citra sebagai negara yang memiliki komitmen kuat terhadap perdamaian dan kerja sama multilateral.

The 44th AIPA General Assembly

Sidang umum ke-44 AIPA adalah pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh DPR RI, di Jakarta, pada tanggal 5-11 Agustus 2023. Para delegasi yang hadir mencakup anggota-anggota parlemen AIPA, pengamat parlemen, sekretaris AIPA, sekretaris ASEAN, dan tamu undangan tuan rumah. Para anggota parlemen yang hadir menjadi delegasi di antaranya, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Pertemuan ini banyak membahas isu-isu regional, termasuk masalah Myanmar hingga proses akses Timor Leste menjadi anggota ke 11 ASEAN.

Bertepatan dengan kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023 dengan mengambil tema *ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*, tema sidang umum AIPA ke-44 beresonansi kuat dengan ASEAN yaitu “*Reponsive Parliaments for a Stable and Prospreous ASEAN*”. Melalui tema ini, AIPA berkomitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara eksekutif ASEAN dan AIPA dalam menanggapi tantangan yang kompleks untuk menjadi lebih adaptif, responsif, dan sejahtera. Sidang Umum ke-44 AIPA bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi ASEAN termasuk meningkatkan peran parlemen dalam mendukung objektif politik, ekonomi, dan sosial ASEAN (AIPA, 2023).

Diskusi yang dilaksanakan selama pertemuan berpusat pada penyusunan solusi kolektif pada isu-isu keamanan regional, pembangunan berkelanjutan, dan pertumbuhan inklusif negara-negara ASEAN. Salah satu contohnya adalah adopsi resolusi-resolusi yang bertujuan untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan regional, seperti perselisihan di Laut Cina Selatan hingga isu Myanmar. Resolusi-resolusi tersebut juga memperkuat komitmen ASEAN untuk menangani isu-isu lintas batas seperti perubahan iklim, penanganan bencana alam, transformasi digital, dan isu lain yang memerlukan badan legislatif untuk ikut turun tangan di isu regional.

Selanjutnya, dalam Sidang Umum AIPA ke-44 ini juga, negara-negara pengamat dan organisasi internasional turut berpartisipasi demi memperkaya diskusi dan perspektif global. Sebagai tuan rumah, Indonesia memastikan bahwa pertemuan ini tidak hanya menjadi forum negosiasi formal, melainkan juga sebagai wadah interaksi informal yang memperkuat hubungan pribadi antara anggota parlemen. Hubungan pribadi ini penting dalam diplomasi parlemen untuk membuka jalan kolaborasi jangka panjang dan kepercayaan di antara negara-negara anggota ASEAN. Sidang ini memfasilitasi dialog terbuka dan pembangunan konsensus di antara berbagai badan legislatif nasional yang menggarisbawahi bagaimana keterlibatan parlemen melengkapi diplomasi tradisional yang dipimpin oleh eksekutif.

Diplomasi Parlemen Indonesia & Kepemimpinan DPR RI dalam the 44th General Assembly

Keterlibatan anggota parlemen Indonesia pada Sidang Umum AIPA ke-44 menunjukkan bagaimana diplomasi parlemen telah menjadi sebuah alat penting untuk memajukan kepentingan nasional dan regional. Sebagai negara penyelenggara sekaligus tuan rumah Sidang Umum ke-44, Indonesia mengirimkan 56 delegasi yang ditempatkan di masing-masing sidang sesuai dengan keahlian mereka untuk melaksanakan diplomasi parlemen. Anggota-anggota parlemen ini khususnya BKSAP memainkan peran penting dalam mengarahkan komite-komite tetap untuk memastikan bahwa berjalannya diskusi dan

perdebatan sesuai dengan tujuan dan kepentingan negara-negara ASEAN serta memajukan prioritas-prioritas Indonesia.

Melalui keaktifan Indonesia dalam berpartisipasi di AIPA, DPR RI melaksanakan praktik diplomasi dan kemampuannya dalam menangani isu-isu ASEAN yang mendesak. Anggoro (2024), tenaga ahli Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengatakan bahwa Indonesia cenderung memimpin diskusi dalam sidang komite yang dilaksanakan pada AIPA ke-44. Salah satu bentuk kepemimpinan yang dilakukan adalah Indonesia mengajukan resolusi mekanisme untuk melakukan pengawasan resolusi ASEAN *5 Points Consensus* (5PC) terhadap Myanmar yang telah dirancang pada tahun 2021. Poin-poin tersebut di antaranya: “(i) *immediate cessation of violence*, (ii) *constructive dialogue to seek a peaceful solution*, (iii) *a Special Envoy of ASEAN will facilitate mediation of the dialogue process*, (iv) *ASEAN shall provide humanitarian assistance*, and (v) *the Special Envoy shall visit Myanmar to meet with all parties concerned*.”

Lebih dari tiga tahun berlalu sejak dikeluarkannya 5PC, belum ada kemajuan berarti yang telah dicapai untuk mewujudkan solusi damai bagi konflik di Myanmar. Karenanya, dengan mempertimbangkan *non-intervention principle* ASEAN, Indonesia melalui DPR RI berdiplomasi dalam forum AIPA untuk membuat mekanisme pengawasan terhadap ASEAN dalam menjalankan 5PC. Melalui cara diplomasi ini, tanpa ada penekanan terhadap Myanmar secara langsung, anggota-anggota parlemen Indonesia mengadvokasi untuk memantau komitmen ASEAN dalam menyelesaikan masalah ini. Strategi ini menunjukkan pendekatan diplomasi parlementer Indonesia yang bernuansa Indonesia-menyeseimbangkan penghormatan terhadap kedaulatan dengan kebutuhan akan akuntabilitas regional

Bukan hanya isu keamanan, Parlemen Indonesia juga mendorong keikutsertaan inklusif dan representatif pada Sidang Umum AIPA ke-44. Isu-isu tersebut termasuk pembahasan fokus dalam keterlibatan pemuda dan perempuan dalam parlemen. Salah satu pencapaian penting adalah keberhasilan Indonesia dalam mendorong pembentukan Forum Anggota Parlemen Muda, sebuah platform yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan kaum muda dalam proses demokrasi dan pembangunan yang inklusif. Meskipun ide ini berasal dari Malaysia, kepemimpinan Indonesia selama pertemuan tersebut memastikan realisasinya, menandai langkah signifikan menuju representasi yang lebih besar bagi para pemimpin muda dalam proses legislatif ASEAN.

Demikian pula, fokus Indonesia pada kesetaraan gender dilambungkan oleh peran penting Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani. Sebagai pemimpin perempuan yang memimpin sidang, kehadirannya menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk memberdayakan perempuan dalam posisi kepemimpinan. Advokasi ini semakin diperkuat dengan penekanan Indonesia terhadap partisipasi perempuan dalam pemerintahan yang demokratis dan kepemimpinan di seluruh negara anggota ASEAN. Selain itu, diplomasi parlemen juga menjadi jalan untuk mempromosikan tujuan jangka panjang seperti pertumbuhan ekonomi hijau. Dengan memperkenalkan diskusi mengenai *green job* dan transisi ekonomi berkelanjutan, Indonesia menyelaraskan kerja sama parlemen dengan agenda pembangunan nasional yang lebih luas.

Terlepas dari pencapaiannya, diplomasi parlemen Indonesia di AIPA juga memiliki berbagai tantangan. Ketergantungan pada konsensus di dalam ASEAN seringkali membatasi kemampuan AIPA untuk mengadopsi resolusi secara tegas, terutama pada isu-isu politik yang sensitif seperti konflik di Myanmar. Selain itu, sifat diplomasi parlementer yang tidak berwujud berarti bahwa dampaknya sering kali tidak langsung dan berjangka panjang. Meskipun resolusi dan inisiatif mungkin tidak memberikan hasil langsung, mereka memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan legislatif dan membangun kepercayaan di antara negara-negara anggota ASEAN.

KESIMPULAN

Diplomasi parlemen merupakan dimensi baru dalam studi Hubungan Internasional yang memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian tujuan nasional maupun regional. Pada era globalisasi, peran parlemen telah melampaui fungsi legislatif tradisional dalam Hubungan Internasional. Indonesia, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), telah menunjukkan kepemimpinan yang signifikan dalam *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, baik sebagai inisiator pendirian organisasi maupun dalam memajukan kepentingan regional. Praktik diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI mencerminkan kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan jalur diplomasi non-tradisional dalam memperkuat kerja sama antar negara ASEAN sekaligus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, perdamaian, dan stabilitas kawasan.

Keberhasilan Indonesia dalam memimpin Sidang Umum AIPA ke-44 tahun 2023 menjadi salah satu pencapaian penting dalam diplomasi parlemen regional. Sebagai tuan rumah, Indonesia mampu mengusulkan dan memfasilitasi resolusi-resolusi yang relevan dengan kebutuhan kawasan, termasuk isu keamanan dan stabilitas regional. Kemampuan Indonesia dalam menggalang dukungan dari negara-negara anggota menunjukkan signifikansi peran DPR RI dalam diplomasi multilateral. Dalam hal ini, peran Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai alat kelengkapan DPR RI turut memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan diplomasi parlemen Indonesia.

Secara keseluruhan, diplomasi parlemen Indonesia melalui AIPA tidak hanya menjadi alat untuk menyuarakan kepentingan nasional, tetapi juga untuk membangun kerja sama yang lebih erat di antara negara-negara ASEAN. Praktik ini menunjukkan bahwa diplomasi parlemen dapat menjadi wadah strategis bagi Indonesia dalam memperkuat pengaruhnya di kawasan sekaligus memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan bersama ASEAN. Hal ini juga mencerminkan peran parlemen sebagai aktor penting dalam menjembatani kepentingan domestik dan internasional, memperluas cakupan diplomasi, dan meningkatkan kredibilitas Indonesia di panggung regional.

REFERENSI

- Adiputri, R. D. (2024). *Interpreting multilateral diplomacy in the Indonesian Parliament's debates on climate crisis and sustainability*. <http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202408225618>
- Anggoro, H., A., Staff Ahli BKSAP DPR RI, 7 November 2024.
- AIPA. (2023). Report of the General Assembly. *CIRP Annals*, 33(2), 527–529. [https://doi.org/10.1016/s0007-8506\(16\)30177-9](https://doi.org/10.1016/s0007-8506(16)30177-9)
- BKSAP DPR RI. (2019). *Selayang Pandang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*. 1–2.
- Boer, G., & Weisglas, F. (2007). Parliamentary Diplomacy. *The Hague Journal of Diplomacy*, 2(1), 93–99. <https://doi.org/10.1163/187119007x180494>
- Cantikaputri, F., & Prihatini Ella Syafputri. (2023). *Parliamentary Diplomacy in Supporting Palestinian Independence: Evidence from Indonesia*. E3S Web of Conferences, 426, 02112. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342602112>
- Cofelice, A. (2016). *The Parliamentary Assembly of the Mediterranean and Its Contribution to Democracy Promotion and Crisis Management*. *The Hague Journal of Diplomacy*, 11(2–3), 292–310. <https://doi.org/10.1163/1871191x-12341331>
- Cresswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications. 978-1-4522-2610-1
- DURDULAR, E. (2017). *Parliamentary Assembly of Turkic-Speaking Countries TurkPA: Beyond Parliamentary Diplomacy*. Volume: 22, Issue: 1 115-142 ; 1300-8641 ; 2651-3315 ; PERCEPTIONS: Journal of International Affairs.

- <https://dergipark.org.tr/tr/pub/perception/issue/48954/624526>
- Ghebali, V.-Y. (1993). *The Conferences of the Inter-Parliamentary Union on European Co-Operation and Security, 1973-1991: The Contribution of Parliamentary Diplomacy to Ea.*
- Götz, N. (2005). On the origins of “parliamentary diplomacy”: Scandinavian “bloc politics” and delegation policy in the league of nations. *Cooperation and Conflict*, 40(3), 263–279. <https://doi.org/10.1177/0010836705055066>
- IPU. (2005). Parliamentary Involvement in International Affairs. *Second World Conference of Speakers of Parliaments*, 7–9.
- Jaskiernia, J. (2022). *Parliamentary Diplomacy – A New Dimension of Contemporary Parliamentarism*; Vol 31, No 5 (2022): Współczesne Wyzwania Parlamentaryzmu – Teoria i Praktyka. Numer Specjalny Poświęcony Pamięci Profesora Wojciecha Orłowskiego (1963–2019); 85-101 ; 1731-6375. <https://journals.umcs.pl/sil/article/view/14645>
- Lamont, C. K. (2015). *Relations, Research Methods in International*. SAGE.
- Løvland, J. G. (1906). ‘The Nobel Peace Prize 1902: Toast at the Nobel Institute on July 18, 1906’. The Nobel Peace Prize. <https://www.nobelprize.org/peace/laureates/1902/toast-speech.html>
- Masters, L. (2015). South Africa ’ S Emerging Parliamentary Diplomacy. *Strategic Review for Southern Africa*, 37(2), 79.
- Guahk, Y., & Hernandez Pepe, I. (2023). *Parliamentary diplomacy between the EU and the Republic of Korea*. *Asia Europe Journal*, 21(4), 587–606. <https://doi.org/10.1007/s10308-023-00688-4>
- Ray, R. (1991). *Parliamentary Diplomacy*. S. Chand & Company.
- Ridwan, M. A., Muhammad Farid, & Ilmi Dwiastuti. (2022). *The Role of Indonesian House of Representatives in Conducting Parliamentary Diplomacy in Resolving the Myanmar Humanitarian Crisis (2017 – 2019)*. *Global Local Interactions: Journal of International Relations*; Vol. 2 No. 2 (2022): Global-Local Interactions: Journal of International Relations; 58-68 ; 2657-0009. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/GLI/article/view/19590>
- Rusk, D. (1955). Parliamentary Diplomacy - Debate vs. Negotiation. *World Affairs Interpreter*, 26.
- Šabič, Z., Fenko, A. B., & Roter, P. (2016). *Small States and Parliamentary Diplomacy: Slovenia and the Mediterranean*. *Mediterranean Quarterly*, 27(4), 42–60. <https://doi.org/10.1215/10474552-3817310>
- Squarcialupi, V. (2000). *Parliamentary Diplomacy: The Role of International Assemblies*.
- Thompson, K. W. (1965). The New Diplomacy and the Quest for Peace. *International Organization*, 19(3), 394–409. <https://doi.org/10.1017/s0020818300012364>
- Wang, L. (2016). Parliamentary Diplomacy in the Chinese Constitution and Foreign Policy. *The Hague Journal of Diplomacy*, 11(2–3), 253–274. <https://doi.org/10.1163/1871191x-12341329>
- Zon, F., & Andika, M. T., . (2021). *INDONESIAN LEADERSHIP IN THE GLOBAL ORGANIZATION OF PARLIAMENTARIANS AGAINST CORRUPTION (GOPAC) AND ITS IMPACT ON THE INSTITUTIONALIZATION OF OPEN PARLIAMENT IN INDONESIA*. *Journal of International Studies*, 17. <https://doaj.org/article/759e77d9c3824f7b9a84f9edd7d8ee21>